

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan adalah bentuk informasi yang menunjukkan tanggung jawab manajemen selama mengelola sumber daya perusahaan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Permatasari *et al.*, 2024). Di Indonesia penyusunan laporan keuangan mengacu ke Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kebebasan kepada setiap perusahaan untuk memilih metode atau prinsip akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan kondisi perusahaannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Dengan adanya berbagai macam metode akuntansi yang dapat diterapkan, manajemen perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan suatu transaksi. Oleh karena itu, pihak pengguna laporan keuangan menuntut pihak perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan agar penyajian setiap angka tertera jelas dimana sumbernya, hal tersebut yang menyebabkan manajer harus menerapkan salah satu prinsip akuntansi yang konservatif. Prinsip konservativisme merupakan suatu prinsip kehati-hatian dalam menyusun sebuah laporan keuangan (Tamur, 2022).

Prinsip konservatisme telah diatur di Indonesia dalam Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.14 mengenai persediaan, PSAK No.17 mengenai akuntansi penyusutan, PSAK No.19 mengenai aktiva tidak berwujud dan PSAK No.20 mengenai biaya riset dan pengembangan. Sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah seharusnya menerapkan prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangannya (Darmayanti *et al.*, 2023).

Financial Accounting Standard Board (FASB) tahun 2018 mendefinisikan konservatisme adalah reaksi kehati-hatian atas ketidakpastian untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian tersebut dan risiko yang melekat dapat dipertimbangkan secara memadai. Penggunaan prinsip konservatisme dapat menghasilkan angka-angka laba yang cenderung rendah dan angka-angka beban yang dihasilkan cenderung lebih tinggi. Dengan adanya kebebasan manajemen perusahaan dalam memilih metode akuntansi, beberapa perusahaan justru menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan untuk manajemen dalam membuat laporan keuangan dengan prinsip optimisme (Yanti *et al.*, 2022).

Watts (2003) menyatakan bahwa konservatisme dapat dikonsepkan sebagai sebuah kriteria seleksi diantara beberapa prinsip akuntansi yang mendorong minimalisasi pelaporan kumulatif laba dan memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan kerugian, mempercepat pengakuan beban, menurunkan penilaian aset, dan menaikkan penilaian kewajiban. Prinsip yang diterapkan dalam proses pelaporan keuangan adalah prinsip konservatisme, dimana penggunaan prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dimasa yang akan datang, sehingga

pengukuran dan pengakuan untuk angka-angka tersebut dilakukan dengan hati-hati.

Menurut Sun & Liu (2011), akuntansi konservatif mengakui kerugian saat ditemukan, tetapi menunda keuntungan hingga diverifikasi. Akibatnya, berita buruk lebih tepat waktu tercermin dalam laba akuntansi daripada berita baik. Konservativisme akuntansi dapat mengurangi masalah keagenan yang timbul dari penggunaan oportunistik manajer atas kebijaksanaan akuntansi.

IASB (*International Accounting Standards Board*), secara eksplisit menyatakan bahwa “netralitas” merupakan komponen penting dari pelaporan keuangan, sementara “konservativisme” atau (kehati-hatian) harus diterapkan dengan hati-hati, dan tidak memungkinkan adanya pernyataan yang meremehkan aset atau pendapatan atau pernyataan yang melebih-lebihkan kewajiban atau biaya secara sengaja. Dalam praktik akuntansi, konservativisme disebut sebagai bias ketika meremehkan pelaporan aset dan pendapatan. Bias ini muncul dari cara aset dan pendapatan dicatat ketika ada ketidakpastian seputar nilai “sebenarnya” (Lopez *et al.*, 2020).

Prinsip konservativisme sendiri masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial, meskipun keberadaan konservativisme tidak diragukan lagi, terdapat perdebatan di antara para peneliti. *Financial Accounting Standards Board* (FASB) tahun 2010 tidak memasukkan konservativisme sebagai salah satu karakteristik kualitatif pelaporan keuangan dalam kerangka konseptualnya karena mereka yakin bahwa konservativisme membiasakan informasi akuntansi dan mengkompromikan netralitas. Konservativisme dianggap sebagai kendala yang

akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan. Beberapa peneliti telah menggemarkan gagasan ini, dengan alasan bahwa konservatisme membiaskan angka-angka laporan keuangan sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang tidak efisien (Gigler *et al.* 2009; Guay & Verrecchia, 2006) dalam (Hejranijamil *et al.*, 2020). Namun di sisi lain, konservatisme akuntansi dianggap bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak (Watts, 2003). Adapun alasan prinsip ini masih dipergunakan adalah karena kecenderungan untuk melebih-lebihkan laba dalam pelaporan keuangan dapat dikurangi dengan menerapkan sikap pesimisme untuk mengimbangi optimisme yang berlebih dari manajer. Selain itu, laba yang disajikan terlalu tinggi (*overstatement*) lebih berbahaya daripada penyajian laba yang rendah (*understatement*) karena risiko tuntutan hukum yang didapat akan lebih besar bila menyajikan laporan keuangan yang jauh lebih tinggi dari yang sesungguhnya terjadi (Haryadi *et al.*, 2020). LaFond & Watts (2008) juga menjelaskan bahwa laporan keuangan yang konservatif dapat mencegah adanya *information asymmetry* dengan cara membatasi manajemen dalam melakukan manipulasi laporan keuangan. Menurutnya, laporan keuangan yang konservatif dapat mengurangi biaya keagenan.

Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, prinsip konservatisme dalam akuntansi dibutuhkan. Alasannya adalah karena kecenderungan yang dilakukan oleh manajemen untuk melebih-lebihkan laba dapat dikurangi dengan penerapan konservatisme. Penelitian yang dilakukan LaFond & Watts (2008) membuktikan

bahwa jika peranan konservatisme akuntansi yang digunakan semakin tinggi akan dapat meminimalkan kesempatan bagi manajer dalam memanipulasi dan melebih lebihkan laba pada laporan keuangan. Tetapi konservatisme tidak boleh diterapkan secara berlebihan karena akan mengakibatkan salah saji dalam laporan laba atau rugi periodiknya sehingga menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan sebagaimana kondisi sebenarnya.

Fenomena mengenai konservatisme akuntansi telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia. Seperti beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang menunjukkan rendahnya penerapan prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangan. Terkait dengan kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu penggelembungan pada beberapa akun dan pos tertentu untuk laporan keuangan tahun buku 2017. Perusahaan telah melakukan penggelembungan pada akun piutang usaha, aset tetap, dan persediaan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 4 Triliun. Terdapat juga penggelembungan lain sebesar Rp.662 Miliar pada pos pendapatan dan Rp.329 Miliar pada pos EBITDA. Disamping itu, ada juga temuan lain terkait transaksi yang tidak memadai dalam hal pengungkapannya kepada pihak stakeholder (www.cnnindonesia.com, 2019). Kecurangan tersebut dilakukan oleh dua mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk untuk meningkatkan penjualan dan harga saham perusahaan (Finance.detik.com, 2021).

Kasus manipulasi laporan keuangan juga terjadi pada PT Indofarma yang tersangkut kasus skandal *overstated* dalam penyajian laporan keuangan. Dari hasil penelitian, BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) menemukan

bukti-bukti di antaranya, barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses sebesar Rp 28.870.000.000. Akibatnya harga pokok penjualan mengalami understated dan laba bersih mengalami overstated dengan nilai yang sama.

Kasus pada PT Inovisi Infracom yang terjadi pada tahun 2015, perusahaan terbukti melakukan kecurangan dengan ditemukannya ketidakcocokan beberapa poin. Poin-poin yang ada yaitu pada akun hutang lain-lain pihak terealisasi dan pihak ketiga, saldo awal aset tetap, laba bersih yang tidak dapat diatribusikan, pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran utang pihak berelasi, laporan segmen usaha, jumlah kewajiban serta instrumen keuangan yang tidak sinkron dengan laporan keuangan tahunan hasil audit. Oleh karena itu, PT Inovisi Infracom dikenai sanksi dari BEI untuk pembekuan saham atau dihentikan (Bareksa.com, 2015). Manipulasi laporan keuangan ini kemungkinan terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang manajemen dalam memilih metode akuntansi dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan.

Terjadinya kasus-kasus ini mengindikasikan rendahnya tingkat konservativisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kasus kecurangan laporan keuangan pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang dilakukan oleh manajemen perusahaan mencerminkan rendahnya tingkat penerapan konservativisme dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, penerapan konservativisme diperlukan agar manajer lebih berhati-hati dan terhindar dari sifat oportunistisme dalam menyusun laporan keuangan serta sebagai upaya meningkatkan informasi laporan keuangan perusahaan. Dan kasus yang terjadi

pada PT Indofarma adalah salah satu bentuk perusahaan yang melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan secara berlebihan (*overstated*) yang terjadi di Indonesia dan mencerminkan bahwa perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi yang baik dalam pencatatan maupun pelaporan keuangan.

Fenomena terkait hasil konservatisme akuntansi telah dikaji oleh (Ruch & Taylor 2015) menemukan bahwa konservatisme bersyarat mengurangi asimetri informasi bagi pengguna pasar ekuitas, namun mengurangi keakuratan perkiraan analis, dan beberapa bukti bahwa hal tersebut mengurangi relevansi nilai. Selain itu, konservatisme bersyarat mengurangi biaya modal utang bagi peminjam, membuat kompensasi eksekutif lebih sensitif terhadap pendapatan akuntansi, dan memberi insentif kepada manajer untuk melakukan lebih sedikit investasi NPV negatif. Terakhir, penelitian tentang pengaruh konservatisme terhadap biaya modal ekuitas beragam.

Penelitian yang dilakukan oleh (Haw *et al.*, 2014) menemukan bahwa perusahaan swasta dengan utang publik menunjukkan tingkat pengakuan kerugian asimetris yang lebih tinggi daripada perusahaan swasta dengan utang swasta eksklusif, yang menunjukkan bahwa pemegang obligasi menuntut akuntansi yang lebih konservatif daripada penyedia pinjaman dan bahwa peminjam mengakomodasi tuntutan tersebut. Kedua, dan yang lebih penting, perusahaan swasta yang menerbitkan obligasi publik untuk pertama kalinya menunjukkan peningkatan konservatisme yang signifikan. Ketiga, perusahaan swasta dengan asimetri informasi yang tinggi menunjukkan peningkatan konservatisme yang

lebih besar setelah penerbitan obligasi awal mereka, yang menunjukkan bahwa pemegang obligasi menuntut akuntansi yang lebih konservatif dari peminjam dengan biaya agensi utang yang lebih besar setelah penerbitan obligasi awal mereka daripada dengan asimetri informasi yang rendah. Keempat, perusahaan swasta dengan risiko kredit tinggi mengalami peningkatan konservatisme yang lebih besar setelah penerbitan obligasi awal mereka dibandingkan dengan perusahaan dengan risiko kredit rendah, yang menyiratkan bahwa manajer menyediakan akuntansi yang lebih konservatif untuk mengurangi biaya kontrak.

Penelitian (Sohn & Zhou, 2017) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat menunjukkan tingkat konservatisme yang lebih rendah karena mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi seperti pinjaman bank dan dana talangan pemerintah dari koneksi politik mereka bahkan tanpa meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka dengan menerapkan tingkat konservatisme akuntansi yang lebih tinggi. Artinya, koneksi politik menjadi pengganti konservatisme akuntansi untuk memperoleh kredit dari pasar. Selain itu, masalah investasi berlebihan yang lazim dan independensi auditor yang terganggu di perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat berkontribusi terhadap penurunan konservatisme.

Dengan adanya kasus yang terjadi dapat kita lihat bahwa perusahaan yang tidak menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dengan baik maka akan menimbulkan masalah terhadap kondisi keuangan perusahaannya dimasa yang akan datang. Kasus-kasus ini mendukung pemikiran-pemikiran yang memandang bahwa penerapan konservatisme akuntansi penting untuk dilakukan. Penerapan

prinsip ini akan mengimbangi sikap optimisme berlebihan dari manajer dan pemilik. Optimisme berlebihan dari manajer dan pemilik sendiri dapat menyebabkan terjadinya *overstatement* laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan prinsip konservatisme ini akan mencegah terjadinya *overstatement* laba yang dapat mengakibatkan dampak yang buruk untuk perusahaan di masa depan (Sari, 2020).

Prinsip konservatisme akuntansi pada suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu, *leverage* (Viola & Diana, 2016). *Leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Jika perusahaan mempunyai hutang yang tinggi, maka kreditur juga mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Hal ini akan menyebabkan asimetri informasi antara kreditur dan perusahaan berkurang karena manajer tidak dapat menyembunyikan informasi keuangan yang mungkin akan dimanipulasi atau melebih-lebihkan aset yang dimiliki (Habiba, 2016)

Mu'minah et al. (2023) menyatakan bahwa *leverage* menunjukkan seberapa besar aset yang digunakan untuk kegiatan operasional suatu perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang relatif tinggi, kreditur memiliki hak yang besar untuk mengetahui dan mengawasi pelaksanaan operasional dan akuntansi perusahaan. Hak yang lebih besar yang dimiliki kreditur akan mengurangi simetri informasi antara kreditur dengan pengelola perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat hutang atau *leverage* suatu perusahaan maka tuntutan untuk penerapan akuntansi konservatisme semakin tinggi pula karena disini kreditur

mempunyai kepentingan terhadap keamanan dana yang diharapkan dapat menguntungkan baginya. Teori keagenan menjelaskan bahwa jika perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka perusahaan akan semakin menerapkan prinsip konservatif.

Penelitian mengenai *leverage* yang dilakukan oleh (Purnamasari & Tashya, 2024) berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, (Darmayanti *et al.*, 2023) menyatakan bahwa *leverage* secara parsial signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rahmi & Baroroh, 2022) bahwa variabel *leverage* mempunyai dampak positif dan substansial pada implementasi konservatisme akuntansi. Namun bertolak belakang dengan penelitian (Kurniawan & Mulyani, 2024), (Pratiwi & Zulfikar, 2024), dan (Priyono & Suhartini, 2022) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi adalah *Investment Opportunity Set* (Blesia *et al.*, 2023). *Investment Opportunity Set* (IOS) didefinisikan sebagai luasnya peluang suatu perusahaan untuk berinvestasi dengan bergantung pada pilihan *expenditure* perusahaan untuk kepentingan dimasa mendatang (Permatasari & Yulianto, 2020). Laporan keuangan bisa menyatakan informasi yang relevan serta akurat sehingga menghasilkan keputusan yang sesuai dalam melakukan investasi. IOS digunakan untuk menunjukkan keputusan investasi suatu perusahaan dalam bentuk aset yang

dimiliki dan dapat menjadi opsi untuk berinvestasi di masa mendatang. *Investment opportunity set* ini berhubungan dengan peluang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar nilai IOS yang dihasilkan maka akan dapat menimbulkan terjadinya penurunan nilai aset terutama pada aset tidak berwujud yang tidak diakui. Ketika terjadi akuisisi dan perubahan nilai yang disebabkan oleh penurunan nilai aset seringkali tidak dicatat maka perusahaan tersebut tidak dapat mengakuinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan dan aset tidak berwujud maka perusahaan tersebut telah menerapkan konservativisme akuntansi pada tingkat yang rendah (Bagaskara & Siagian, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Priatiningsih & Sari, 2023; Wiharno et al., 2023), (Heriansyah et al., 2022), dan (Permatasari & Yulianto, 2020) menyatakan bahwa *investment opportunity set* berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservativisme akuntansi. Hasil penelitian dari Blesia et al. (2023), Bagaskara & Siagian (2023), Goffar & Muhyarsyah (2022), dan Yunita & Salim (2022) berbanding terbalik, *investment opportunity set* tidak berpengaruh terhadap konservativisme akuntansi.

Adanya inkonsisten hasil riset terkait pengaruh *leverage* dan *investment opportunity set* terhadap konservativisme akuntansi sehingga menimbulkan penambahan variabel moderasi yakni *political connections* kedalam kerangka penelitian. *Political connections* sebagai variabel pemoderasi terkait pengaruh *leverage* dan *investment opportunity set* terhadap konservativisme akuntansi, dimana variabel ini nantinya akan memperkuat atau memperlemah pengaruh

diantara variabel independen (*leverage* dan *investment opportunity set*) pada variabel dependen (konservatisme akuntansi). Alasan dipilihnya *political connections* sebagai moderasi karena *political connections* juga menjadi faktor pengaruh penerapan konservatisme akuntansi pada perusahaan (Wati *et al.*, 2020; Mohammed *et al.*, 2017; (Kong *et al.*, 2017).

Konservatisme akuntansi juga dapat dipengaruhi oleh faktor non keuangan seperti *political connections*. Beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa *political connections* memiliki pengaruh bagi perekonomian di Indonesia (Habib *et al.*, 2017). Mu'minah *et al.* (2023) *political connection* adalah keadaan dimana terdapat suatu hubungan antara pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak yang berkepentingan politik digunakan untuk mencapai hal-hal tertentu yang dapat menguntungkan keduanya. Nazara *et al.* (2023) menyatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik akan semaksimal mungkin memanfaatkan peluang demi meningkatkan serta memperluas jaringan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai hubungan politik jika setidaknya salah satu dari perusahaan pimpinan (dewan komisaris atau direksi), pemegang saham utama telah atau sedang berada saat ini menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen atau mempunyai hubungan dekat dengan politisi atau partai politik. Sebagai contoh di negara berkembang seperti Indonesia, praktik koneksi politik dapat ditandai dengan jumlah anggota komisaris dan direksi yang berasal dari pemerintahan ataupun kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tersebut (Ika *et al.*, 2021)

Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung kurang konservatif dan kurang termotivasi untuk melaporkan kerugian tepat waktu, serta cenderung melaporkan laba yang besar karena perusahaan tersebut dilindungi oleh pemerintah (Joni *et al.*, 2020). Perusahaan dengan komisaris dan anggota dewan yang memiliki koneksi politik dianggap memiliki praktik tata kelola perusahaan yang lebih buruk dan agensi yang lebih besar, yang menyebabkan kurangnya penerapan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan mereka (Shen *et al.*, 2015)

Penelitian Kong *et al.* (2017) *political connections* terhadap konservatisme akuntansi bahwa ada hubungan positif antara intensitas lobi perusahaan dan tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan. Hasil tersebut kuat setelah mengendalikan koneksi politik di suatu perusahaan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chaney *et al.* (2011), namun terdapat juga penelitian yang menemukan hasil negatif antara koneksi politik terhadap konservatisme akuntansi yaitu oleh Satria *et al.*, (2023) Sohn & Zhou (2017), dan Mohammed *et al.* (2017).

Dari penjelasan latar belakang diatas dan pemaparan mengenai penelitian terdahulu terdapat ketidakkonsistenan antara faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi. Ketidakkonsisten menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai variabel yang mengalami ketidakkonsistenan tersebut. Variabel yang diambil oleh penulis yaitu *leverage* dan *investement opportunity set* dan dimoderasi oleh *political connections*. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahan non keuangan. Alasan penulis mengambil penelitian pada

perusahaan non keuangan karena terjadinya fenomena kasus pada perusahaan tersebut yang melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan secara berlebihan (*overstated*). Terjadinya kasus ini mengindikasikan rendahnya tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2020 hingga 2023 adalah tahun terkini yang dapat memberikan kondisi terbaru dari perusahaan non keuangan dalam menerapkan konservatisme akuntansi. Oleh karena itu, judul penelitian yang diambil oleh penulis yaitu : **Pengaruh Leverage dan Investment Opportunity Set terhadap Konservatisme Akuntansi: Peran Moderasi Political Connections.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?
2. Apakah *investment opportunity set* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?
3. Apakah *political connections* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?
4. Apakah *political connections* dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap konservatisme akuntansi?
5. Apakah *political connections* dapat memoderasi pengaruh *investment opportunity set* terhadap konservatisme akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap konservatisme akuntansi
2. Untuk menganalisis pengaruh *investment opportunity set* terhadap konservatisme akuntansi
3. Untuk menganalisis pengaruh *political connections* terhadap konservatisme akuntansi?
4. Untuk menganalisis pengaruh *political connections* dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap konservatisme akuntansi
5. Untuk menganalisis pengaruh *political connections* dalam memoderasi pengaruh *investment opportunity set* terhadap konservatisme akuntansi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan wawasan bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *leverage* dan *investment opportunity set* terhadap konservatisme akuntansi: peran moderasi *political connections* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk dapat membantu para manager agar lebih memahami prinsip konservativisme dalam akuntansi supaya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
- b. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi, sehingga dapat digunakan informasi ini sebagai gambaran untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, serta dapat menanggulangi konflik antara manager dan pemegang saham, karna hal ini dapat berdampak pada perusahaan.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya dan pihak lain, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai konservativisme akuntansi sebagai sumber literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini